



# **RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2025 - 2029**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH)  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

## BAB II MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

## BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I. Pendahuluan;
  - b. BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

- c. BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
  - d. BAB IV. Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - e. BAB V. Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. Dinas Pariwisata;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Dinas Kehutanan;
- x. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

- aa. Sekretariat Daerah
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk dilakukan penyampaian rekomendasi oleh Kepala Bappeda.

#### BAB V

#### PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
  - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun, kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

## KATA PENGANTAR

Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan riset dan inovasi daerah selama lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029.

Melalui dokumen Renstra ini, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu *“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”*. Renstra ini juga memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur dan terarah, sebagai bentuk kontribusi BRIDA dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari jajaran pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi profesi, maupun masyarakat.

Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh jajaran BRIDA Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya, sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi demi terwujudnya pembangunan Kalimantan Timur yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Samarinda, 23 Desember 2025

Kepala Balitbangda Prov. Kaltim



Dr. M. H. P. Fitriansyah, S.T., M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19731127 200604 1 009

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya.....	15
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	15
2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung.....	18
2.3 Kinerja dan Penyelenggaraan Pelayanan.....	19
2.4 Mitra Kerja.....	20
2.5 Permasalahan.....	22
2.6 Tantangan dan Peluang.....	23
2.7 Isu Strategis.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	25
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	26
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	29
BAB V PENUTUP.....	64

## DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Keterkaitan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah.....	2
Gambar 1.2	Penjabaran Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi ke dalam Renstra BRIDA Kaltim.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim.	8
Gambar 2.2	Mitra Kerja Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur.....	21
Gambar 3.1	Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.....	26
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim .....	30

## DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Balitbangda/BRIDA Kaltim.....	16
Tabel 2.2	Capaian Kinerja pelayanan Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur.....	20
Tabel 2.3	Permasalahan Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur.	22
Tabel 2.4	Isu Strategis Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur....	24
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	26
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029 .....	27
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Balitbangda/BRIDA Kaltim.....	28
Tabel 4.1	Cascading Kinerja Renstra Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim	31
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim .....	41
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Pendanaan	54
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	63
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Kaltim 2025-2030 .....	63
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Balitbangda Provinsi Kaltim 2025-2030 .....	63

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan merupakan suatu siklus dalam proses menentukan kebijakan melalui urutan pilihan yang tepat dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 43 tahun 2023, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur telah berubah nomenklturnya menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan nomenklatur tersebut juga telah mengubah lingkup tugas dan fungsinya, semula hanya di lingkup penelitian dan pengembangan (Litbang), menjadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, dan Evaluasi Kebijakan (Litbangjirap-Inovek).

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah Kalimantan Timur

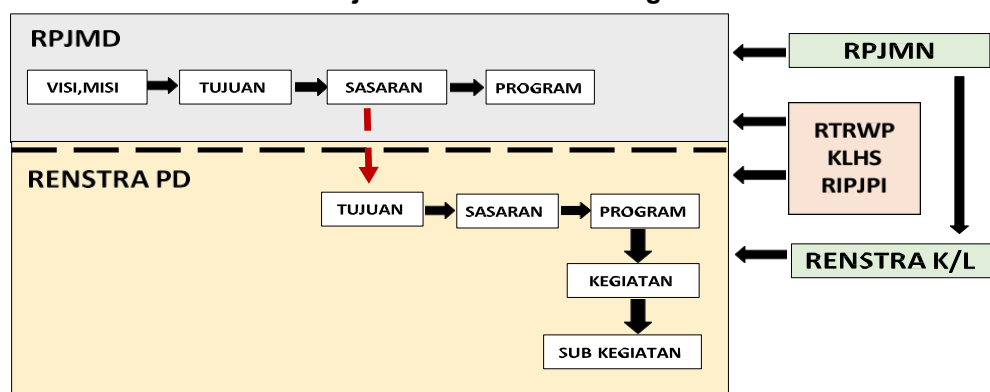
menjabarkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yaitu “ **Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas**”, dengan Misi :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
- 2) Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah.
- 3) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan.
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi.
- 5) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal.
- 6) Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

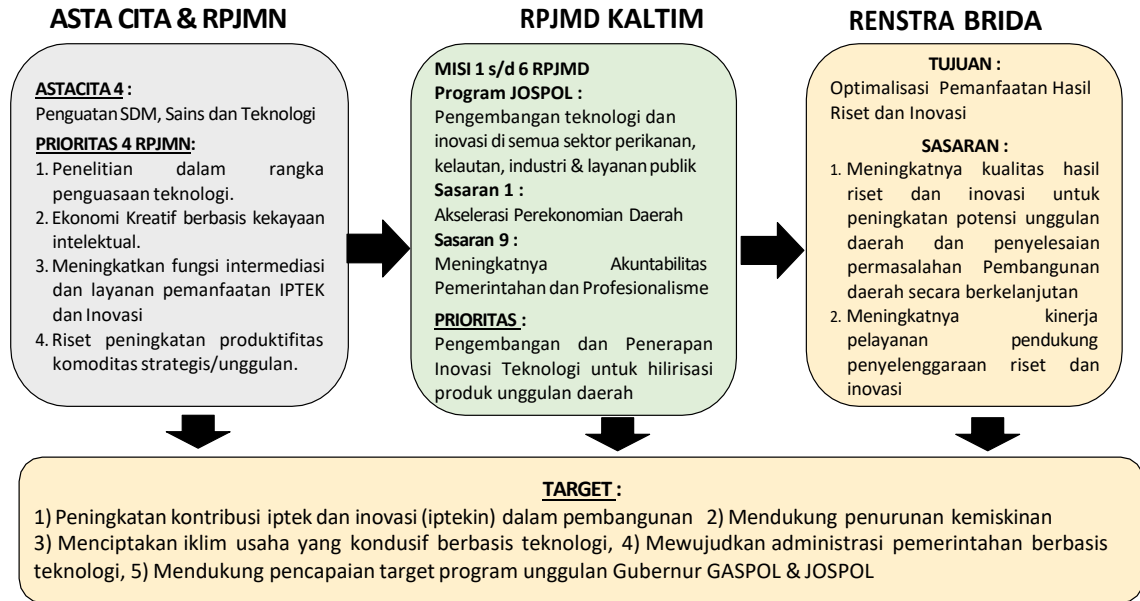
Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi RPJMD tersebut, dan berdasarkan pada tugas dan fungsinya, Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah Kalimantan Timur diarahkan untuk mendukung pencapaian Program Unggulan JOSPOL yaitu Pengembangan Teknologi dan Inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri & layanan publik, dan target sasaran RPJMD yaitu ; Sasaran 1 Akselerasi Perekonomian Daerah; dan Sasaran 9 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme.

Keterkaitan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah Kalimantan Timur dengan kebijakan perencanaan pembangunan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Keterkaitan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah**



**Gambar 1.2 Penjabaran Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi ke dalam Renstra BRIDA Kaltim**



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang Undang nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2045;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
14. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi

Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan RPJMD Kaltim 2025-2029 ke rencana yang lebih operasional dan fokus pada urusan, tugas dan fungsi Balitbangda/BRIDA, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Riset dan Inovasi Daerah Kalimantan Timur adalah:

1. Memberikan arah dan acuan dalam mewujudkan tanggungjawab yang diemban sesuai tugas dan fungsi Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim, dalam rangka mendorong pencapaian sasaran dan target RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2025-2029.
2. Memberikan arahan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan komitmen target kinerja yang disepakati ingin dicapai (performance agreement ) dalam periode tahun 2025-2029.
3. Menjadi acuan untuk menyusun rencana kerja organisasi serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan organisasi yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan dengan penganggaran.

4. Menjadi acuan dalam sinergi, koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan riset dan inovasi dengan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders).
5. Menjadi instrument pengendalian dan evaluasi kinerja melalui penilaian capaian kinerja dan mengidentifikasi kinerja yang perlu ditingkatkan.

#### **1.4 Sistematika**

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan secara ringkas tentang pengertian dan fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra dengan rencana kebijakan pembangunan lainnya. Memuat juga landasan hukum penyusunan renstra, penjelasan maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim yang di dalamnya memuat dasar hukum pembentukan organisasi, sumberdaya yang dimiliki, mitra kerja, kondisi capaian kinerja pelayanan berdasarkan hasil evaluasi, tantangan dan peluang, permasalahan, dan isu strategis.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat penjelasan tentang pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim beserta indikator kinerja yang ingin dicapai, rumusan strategi dana arah kebijakan selama lima tahun kedepan yang relevan dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta pendanaan indikatif dan target indikator kinerja yang ingin dicapai selama 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian target RPJMD.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan, harapan dan komitmen Renstra Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim tahun 2025-2029.

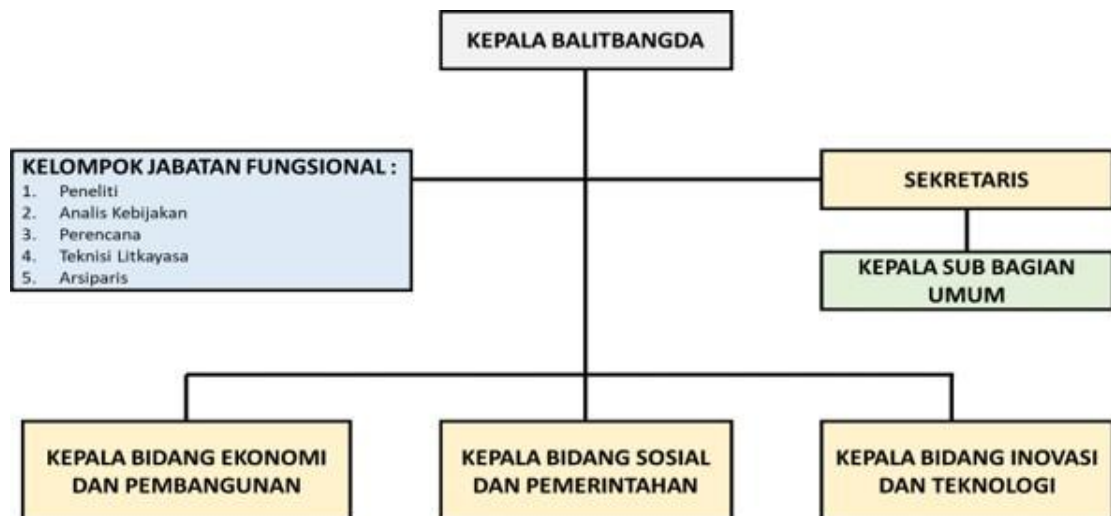
## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 43 tahun 2023, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur telah berubah nomenklturnya menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan nomenklatur tersebut juga telah mengubah lingkup tugas dan fungsinya, semula hanya di lingkup penelitian dan pengembangan (Litbang), menjadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, dan Evaluasi Kebijakan (Litbangjirap-Inovek).

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)/Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub bagian Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim



Tugas dan Fungsi Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim terdiri dari Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi, dan Evaluasi Kebijakan (Litbangjirap-Inovek) dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Kepala Badan

Kepala Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi dan Inovasi, serta evaluasi kebijakan, yang terintegrasi di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi serta evaluasi kebijakan di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi serta evaluasi kebijakan di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi serta evaluasi kebijakan di daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. Koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;

- h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris memimpin Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal Balitbangda/BRIDA dan pemberian dukungan teknis administrasi, serta bertanggung jawab kepada Kepala Balitbangda/BRIDA.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF Substansi.
- c. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **3. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan**

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan penelitian pengembangan teknis di bidang Sosial dan Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang sosial dan pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sosial budaya;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sosial budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **4. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan teknis dibidang ekonomi dan pembangunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang ekonomi dan pembangunan;

- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan ekonomi;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **5. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi**

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang inovasi dan teknologi;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang inovasi dan pengembangan teknologi;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang diseminasi kelitbang;

- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi serta diseminasi kelitbangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **6. Kepala Sub Bagian Umum**

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset, urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas, fungsi, dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti dan Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti meliputi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta evaluasi kebijakan di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta evaluasi kebijakan;
  - c. Kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta evaluasi kebijakan di daerah;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, Inovasi dan inovasi, serta evaluasi kebijakan di daerah;
  - e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, inovasi dan inovasi, serta evaluasi kebijakan di daerah;
  - f. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian inovasi dan inovasi di daerah, menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan inovasi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
  - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inovasi dan inovasi, kerjasama inovasi dan inovasi, serta kemitraan inovasi dan inovasi di daerah;
  - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang inovasi dan inovasi, kerjasama inovasi dan inovasi, serta kemitraan inovasi dan inovasi di daerah;
  - d. Pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi di daerah;
  - e. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

- f. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan memiliki tugas melaksanakan kajian dan analisis kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan solusi, implementasi, hingga evaluasi. Analisis kebijakan juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk hilirisasi hasil riset dan inovasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menganalisis berbagai aspek kebijakan, seperti isu-isu kebijakan, masalah yang ingin dipecahkan, alternatif solusi, dan dampak kebijakan.
- b. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pengambil keputusan terkait kebijakan yang akan diambil atau dievaluasi dalam bentuk Naskah Kebijakan (Policy Brief).
- c. Memantau pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi dampaknya, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.
- d. Membuat laporan hasil analisis, rekomendasi kebijakan, dan dokumen pendukung lainnya.
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan instansi pemerintah, lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, dan pihak terkait lainnya.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

## **2.2 Sumber Daya**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Secara keseluruhan komposisi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2025 berjumlah 71 Orang, terdiri dari 40 ASN dan 29 PPPK, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Balitbangda/BRIDA Kaltim**

No.	JENJANG JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN	KEPAKARAN	JUMLAH (Orang)
<b>A</b>	<b>STRUKTURAL</b>				
	Kepala Badan (Esselon 2)	Pembina Utama Madya/IV d	S3	Teknologi Industri dan Manajemen	1
	Sekretaris (Esselon 3)	Pembina Tingkat 1/IVb	S2	Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Tata Ruang, dan Ilmu Lingkungan	1
	Kabid Sospem (Esselon 3)	Pembina Tingkat 1/IVb	S2	Ekonomi dan Ilmu Pemerintahan	1
	Kabid Ekbang (Esselon 3)	Pembina/IVa	S2	Ekonomi Manajemen dan Administrasi Publik	1
	Kabid IT (Esselon 3)	Pembina/IVa	S2	Manajemen, Sosial dan Politik	1
	Kasubbag Umum (Esselon 4)	Penata Tingkat 1/III d	S1	Manajemen	1
<b>B</b>	<b>FUNGSIONAL</b>				
<b>1.</b>	<b>Peneliti</b>				
	Peneliti Utama	Pembina Tingkat 1/IVb	S3	Teknologi Hutan, Ilmu Lingkungan, Bioteknologi Hutan	1
	Peneliti Madya	Pembina Tingkat 1/IVb	S2	Teknik Kimia dan Ilmu Lingkungan	1
		Pembina Tingkat 1/IVb	S3	Pertanian dan Bioteknologi Pertanian dan Kehutanan	1
	Peneliti Muda	Penata Tingkat 1/III d	S2	Pertanian Tropikal Basah, , Agronomi	1
		Penata Tingkat 1/III d	S3	Teknik Sipil, Kehutanan	1
		Penata Tingkat 1/III d	S2	Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pembangunan	1

		Penata Tingkat 1/III d	S2	Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Publik	1
		Penata/III c	S2	Perencanaan Wilayah dan Kota	1
		Penata/III c	S2	Teknik Pertambangan, Lingkungan	1
		Penata/III c	S2	Administrasi Publik, Administrasi Negara Kebijakan Publik	1
	Peneliti Pertama	Penata Muda Tingkat 1/III b	S2	Teknik Industri, Manajemen	1
		Penata Muda Tingkat 1/III b	S3	Manajemen Hutan, Ilmu Lingkungan	1
		Penata Muda Tingkat 1/III b	S2	Hukum	1
		Penata Muda Tingkat 1/III b	S2	Teknik Kimia, Lingkungan	1
		Penata Muda Tingkat 1/III b	S2	Ilmu Sosial, Ilmu Sosial dan Politik	1
	Teknisi Penelitian dan Perencanaan Terampil	Pengatur/II c	D3	Teknik Sipil	1
<b>2.</b>	<b>Analisis Kebijakan</b>				
	AK Utama	Pembina Utama/IV e	S2	Ekonomi dan Pembangunan, Perencanaan Kota dan Daerah	1
	AK Madya				
	AK Muda	Pembina/IV a	S2	Administrasi Negara	1
		Penata Tingkat 1/III d	S1	Ilmu Hukum	1
		Penata Tingkat 1/III d	S1	Ilmu Sosial	1
		Penata Tingkat 1/III d	S1	Administrasi Negara	1
C	PELAKSANA	Penata/III c	S1	Manajemen	1
		Penata/III c	S1	Sistem Informasi	1
		Penata/III c	D3	Manajemen Keuangan dan Perbankan	1
		Penata Muda Tingkat 1/III b	SMA		1
		Penata Muda/III a	S1	Akuntansi	1
		Penata Muda/III a	SMA		1
		Penata Muda/III a	SMA		1
		Penata Muda/III a	SMA		1
		Penata Muda/III a	SMA		1
		Pengatur Tingkat 1/II d	SMK	Keuangan	1

		Pengatur Tingkat 1/II d	SMA		1
		Pengatur Tingkat 1/II d	SMA		1
		Pengatur Tingkat 1/II d	SMA		1
		Pengatur/II c	SMA		1
		Pengatur Muda/II a	SMP		1
D	PPPK	Golongan IX	S1	Manajemen Hutan	1
		Golongan IX	S1	Ilmu Komunikasi	1
		Golongan IX	S1	Teknik Sipil	1
		Golongan IX	S1	Akuntansi	1
		Golongan IX	S1	Sosial Ekonomi Pertanian	1
		Golongan IX	S1	Teknik Pertambangan	1
		Golongan IX	S1	Pendidikan Bahasa Inggris	1
		Golongan IX	S1	Manajemen	1
		Golongan IX	S1	Teknik Informatika	1
		Golongan IX	S1	Kesehatan Masyarakat	1
		Golongan IX	S1	Ilmu Komputer	1
		Golongan IX	S1	Akuntansi	1
		Golongan IX	S1	Ilmu Sosial	1
		Golongan IX	S1	Teknik Informatika	1
		Golongan IX	S1	Akuntansi	1
		Golongan IX	S1	Ilmu Komputer	1
		Golongan VII	D3	Akuntansi	1
		Golongan V	SMK	Administrasi Perkantoran	1
		Golongan V	MA Negeri	IPS	1
		Golongan V	SMK	Teknik Alat Berat	1
E	TAD		S1	Manajemen SDM	1
			S1	Psikologi	1
			S1	Agro Teknologi	1
			S1	Perikanan dan Ilmu Kelautan	1
			S1	Sistem Informasi	1
			SMA	IPS	1

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung tugas dan fungsi Badan litbang adalah sebagai berikut :

- Bangunan kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Ruang seminar, diskusi, persentasi dan lain-lain dilengkapi meubelair dan Audio Visual System

- Ruang rapat staf lengkap dengan meubelair
- Ruang Peneliti
- Ruang Diseminasi Kelitbangan
- Ruang Arsip dan Perpustakaan
- Ruang Satpam
- Ruang Co Working Space (CWS)
- Ruang Workshop/Bengkel
- Jaringan Internet
- Gudang
- Kendaraan dinas roda empat dan roda dua
- Notebook, PC dan Printer
- Pesawat tanpa awak (Drone)
- Sarana Dokumentasi
- Televisi, Interactive TV, dan Videotron
- Layar persentasi/LC
- Sarana/prasarana lainnya dalam mendukung kegiatan administrasi dan penelitian

### **2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan**

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur semakin baik, ditunjukkan oleh nilai SAKIP dari 70 tahun 2024 hingga mencapai 75,25 di tahun 2025, dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) mencapai 86,32. Sebagian besar target kinerja telah tercapai dan bahkan terdapat beberapa kinerja yang telah melampaui target.

Dalam penyelenggaraan riset dan inovasi, Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur juga telah memperoleh beberapa penghargaan di tingkat nasional pada tahun 2024, yaitu :

- a. Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Manusia IPTEK terbaik Nasional.
- b. Innovative Government Award (IGA) dengan kategori Provinsi sangat inovatif
- c. Indeks Inovasi Daerah tertinggi Regional III (wilayah Kalimantan dan Sulawesi)

**Tabel 2.2 Capaian Kinerja pelayanan Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur**

NO.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi (IKU)	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke- (%)			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.1	<b>Tujuan 1 : Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi</b>												
1.1.1	Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah				1	3	6	1			100		
1.1.2	Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah				1	3	6	1			100		
2.1	<b>Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan Pembangunan daerah secara berkelanjutan</b>												
2.1.1	Jumlah Hasil Riset yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Stakeholders, Pihak yang Berkepentingan, dan Masyarakat)				2	5	10	2			100		
2.1.2	Jumlah Hasil Inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah (Stakeholders, Pihak yang Berkepentingan, dan Masyarakat)				2	5	10	2			100		
1.2	<b>Tujuan 2 : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas</b>												
1.2.1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				73/BB	74/BB	75/BB	78,74 (BB)			107,86		
1.2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah				86	87	88	86,05			101,23		
2.2	<b>Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan riset dan inovasi</b>												
2.2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Balitbangda (Predikat)				70 (B)	73 (BB)	75 (BB)	75.25 (BB)			107,5		
2.2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda (Indeks)				83	84	85	86			103,61		

## 2.4 Mitra Kerja

Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur telah membangun ekosistem riset dan inovasi melalui kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak di dalam negeri dan luar negeri. Mitra kerja yang telah bekerjasama dengan Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini sebagai berikut :

- a. **Kementerian/Lembaga** ; Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, dan Otorita IKN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
- b. **Perguruan Tinggi Luar Negeri** ; Utrecht University Belanda, Adelaide University Australia, Mokpo National University Korea Selatan, Universiti Utara Malaysia.
- c. **Perguruan Tinggi Dalam Negeri** ; Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Universitas Islam Indonesia

(UII), Universitas Pattimura, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Kalimantan, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Mulawarman, STMIK Wicida, Universitas Nahdlatul Ulama, UINSI Samarinda, Universitas Widyagama Mahakam, Universitas 17 Agustus Samarinda, Universitas Kutai Kartanegara, Politeknik Negeri Samarinda, Universitas Muhammadiyah Kaltim, STIMI Samarinda, STIPER Kutai Timur, STT Migas Balikpapan, STIKES Samarinda, Politeknik Sendawar, ITKES WHS Samarinda, Politeknik Negeri Balikpapan, Politani Samarinda, dan Universitas Balikpapan.

- d. **Asosiasi Profesi** ; Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), National Association of Underwater Instructors (NAUI), Perhimpunan Periset Indonesia (PPI), Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI), Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI), Indonesia Science Center (ISC), Dekranasda Kaltim, GEKRAFS dan GEKRAF.
- e. **Pemerintah Kabupaten/Kota** se Kalimantan Timur.

**Gambar 2.2 Mitra Kerja Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur**



## 2.5 Permasalahan

Dalam dinamika perkembangan daerah saat ini, walaupun kondisi kinerja pelayanan penyelenggaraan riset dan inovasi semakin membaik, Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai permasalahan terkait pemanfaatan hasil riset, mekanisme pendanaan yang belum ideal, hilirisasi hasil riset, dan kualitas sumber daya manusia.

**Tabel 2.3 Permasalahan Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur**

MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi belum optimal	Belum efektifnya penerapan regulasi terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan	Belum dikukuhkannya perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai amanat Perda Kaltim No.2 Th 2023 dan Pergub 43 Tahun 2023
		Kurangnya Komitmen Stakeholders untuk memanfaatkan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan
		Kurangnya pemahaman tentang manfaat hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan
	Kurangnya upaya Hilirisasi Hasil Riset dalam bentuk Naskah Kebijakan (Policy Brief), Inovasi dan pengembangan inovasi sebagai produk/layanan yang bermanfaat bagi masyarakat	Keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung hilirisasi hasil riset dan inovasi
		Hilirisasi hasil riset dan inovasi belum memiliki pasar yang jelas, sehingga terkendala untuk dikomersialisasikan
		Kurangnya kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha dalam upaya hilirisasi hasil riset dan inovasi
		Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas hilirisasi hasil Riset dan Inovasi membutuhkan waktu proses yang lama dan anggaran yang besar
	Kualitas Hasil Riset dan Inovasi belum memenuhi kebutuhan peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	Jumlah kebutuhan Riset dan inovasi lebih besar dibandingkan dengan kemampuan produksi Riset dan inovasi itu sendiri.
Terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat untuk mendukung kualitas riset dan inovasi		
Penyelenggaraan riset dan inovasi antar wilayah dan antar sektor belum sinergi dan terpadu		
Skema pendanaan melalui kolaborasi pendanaan riset dan inovasi di luar APBD belum memadai dan terkendala kompleksitas persyaratan administrasi		
Kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi belum optimal	Belum efektifnya Tata kelola pelayanan administrasi penyelenggaraan riset dan inovasi	Keterbatasan kapasitas SDM aparatur dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan
		Belum tersedianya pusat pengolahan data dan informasi riset dan inovasi berbasis teknologi informasi
		Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan riset dan inovasi

## 2.6 Tantangan dan Peluang

Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan pembangunan, Provinsi Kalimantan Timur saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar terutama dalam kondisi ketidakpastian global dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Kita akan menghadapi Megatrend Global yang akan memberikan pengaruh dan dampak signifikan terhadap tatanan kehidupan pada peradaban baru di masa depan. Kemajuan teknologi dan inovasi digital yang sangat pesat memiliki implikasi luas yang mendasari terjadinya pergeseran tatanan sosial dan ekonomi. Semakin berkembangnya model bisnis baru dimana lapangan kerja didominasi oleh digitalisasi, kedepannya kemungkinan dapat terjadi perubahan-perubahan yang unpredictable.

Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan Riset dan Inovasi di daerah Kalimantan Timur, antara lain :

1. Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang efektif untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan Provinsi.
2. Membangun Ekosistem Riset dengan SDM yang unggul, Infrastruktur dan pendanaan riset yang memadai dengan dukungan kemitraan multipihak.
3. Peningkatan kualitas riset dan inovasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Spasial dalam menghadapi Megatrend Global.

Disamping adanya tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang dalam pengembangan Riset dan Inovasi di daerah Kalimantan Timur antara lain :

1. Pengembangan Riset dan Inovasi terkait peluang sektor unggulan untuk transformasi ekonomi.
2. Pengembangan Riset dan Inovasi terkait Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (kebumihan dan maritim)
3. Pengembangan kerjasama Riset dan Inovasi multipihak.
4. Pengembangan Riset dan Inovasi terkait teknologi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

## 2.7 Isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang sangat besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kinerja Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang.

Isu strategis ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan riset dan inovasi, baik internal maupun eksternal.

**Tabel 2.4 Isu Strategis Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN BRIDA	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS BALITBANGDA/BRIDA
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<p>Kondisi makro perekonomian semakin baik, dengan Laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat, dan kesenjangan semakin menurun</p> <p>Kondisi sosial semakin baik dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang semakin menurun, Usia harapan hidup semakin meningkat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah semakin meningkat.</p> <p>Kondisi lingkungan semakin membaik dengan indeks kualitas lingkungan semakin meningkat, dan Emisi GRK semakin menurun.</p> <p>Tata kelola birokrasi semakin baik dengan indeks reformasi birokrasi dan akuntabilitas semakin meningkat.</p> <p>wilayah daratan yang sangat luas ± 12,73 juta Ha, dan potensial bagi pengembangan sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan dan industri pengolahan.</p> <p>Wilayah pesisir yang panjangnya 3.776 Km dan luas ± 2,57 juta Ha, memiliki potensi ekonomi pesisir dan kelautan yang sangat besar</p> <p>Jumlah penduduk usia produktif yang besar sekitar 3,1 Juta Jiwa (76,73 %), didominasi laki-laki 2,09 juta jiwa (69,43 %)</p> <p>Memiliki kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi atau bernilai konservasi tinggi seluas ± 819 ribu Ha</p>	<p>Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi belum optimal</p> <p>Kualitas Hasil Riset dan Inovasi belum memenuhi kebutuhan peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan</p> <p>Kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi belum optimal</p>	<p>Pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan</p> <p>Kesehatan, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender</p> <p>Industri, inovasi, dan infrastruktur</p> <p>Pembangunan ramah lingkungan, perubahan iklim dan transisi energi</p> <p>Perwujudan kota dan permukiman berkelanjutan (air bersih, sanitasi, dll)</p> <p>Penanganan dampak pemindahan IKN</p>	<p>Pelaksanaan agenda SDG's</p> <p>Komitmen transisi energi</p> <p>Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia</p> <p>Globalisasi tenaga kerja</p> <p>Perkembangan teknologi</p> <p>Tantangan perubahan iklim</p> <p>Ketahanan pangan</p>	<p>Pembangunan IKN, Superhub Ekonomi IKN, dan Mitra IKN</p> <p>Investasi sektor SDM</p> <p>Penanganan stunting</p> <p>Penurunan kemiskinan</p> <p>Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</p> <p>Kebijakan ekonomi hijau dan biru</p>	<p>Konektivitas wilayah</p> <p>Peningkatan Kualitas SDM lokal</p> <p>Kemiskinan dan kesenjangan</p> <p>Link &amp; match pendidikan-DUDI</p> <p>Diversifikasi ekonomi</p> <p>Kerusakan ekosistem</p> <p>Ketahanan pangan</p> <p>Pengembangan Industri</p> <p>Pemenuhan SPM</p> <p>Minimnya pusat pertumbuhan</p>	<p>Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi</p> <p>Peningkatan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan</p> <p>Peningkatan kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi</p>

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Sesuai dengan Tugas dan fungsinya, Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, berperan dalam pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Berdasarkan isu strategis, tujuan yang ingin dicapai Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur hingga lima tahun mendatang adalah “**Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi**”. Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting didalam memberikan sumbangsih hasil riset dan inovasi yang dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kaltim.

Sasaran yang ingin dicapai Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur hingga lima tahun mendatang adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
2. Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi.

Target kinerja Tujuan dan Sasaran merupakan Indikator kinerja utama (IKU) dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim.

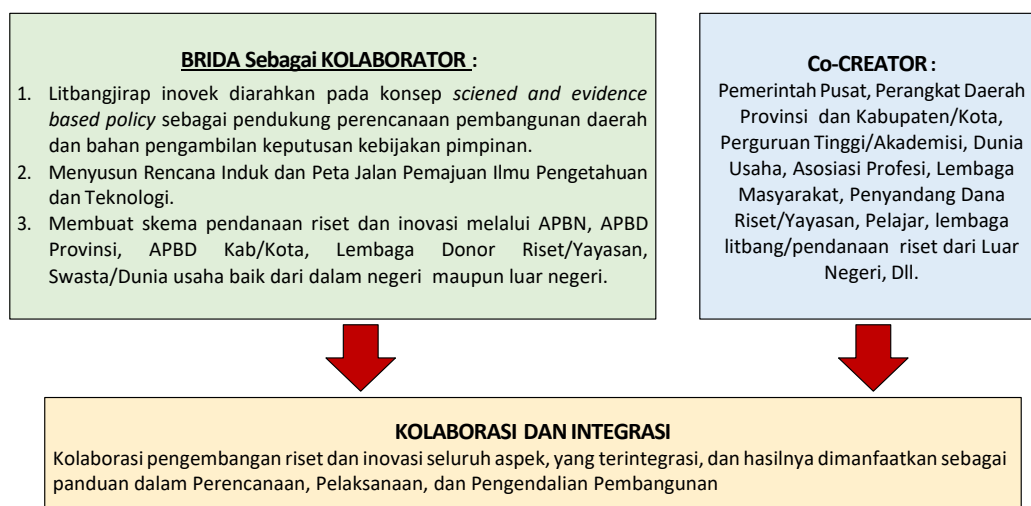
**Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra  
Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TUJUAN 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses SASARAN 1 : Akselerasi Perekonomian Daerah	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	Tujuan: 1. Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan	%	69,70	72,73	75,76	81,82	87,88	93,94	
			2. Indeks Inovasi Daerah	Indeks	62,87	64,00	65,13	66,26	67,39	68,52	
		Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Sasaran 1: 1. Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	60,61	66,67	72,73	78,79	84,85	90,91	
			2. Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	44,44	51,85	55,56	59,26	62,96	66,67	
TUJUAN 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik SASARAN 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme		Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Sasaran 2: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86,32	86,89	87,11	87,78	88,41	89,76	
2. Nilai AKIP Perangkat Daerah			Nilai	75,25	75,87	76,65	77,13	77,89	78,32		

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka meningkatkan kontribusi riset dan inovasi dalam pembangunan daerah, diperlukan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan. Secara garis besar, strategi diarahkan kepada penguatan penyelenggaraan riset dan inovasi melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah berkelanjutan, dimana Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim sebagai fasilitator dan kolaborator.

**Gambar 3.1 Strategi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah**



Strategi dan arah kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran dalam lima tahun kedepan.

**Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda/BRIDA Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029**

VISI : Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas				
<b>MISI :</b> 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera 2. Mewujudkan Kalimantan Timur Sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi. 5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal. 6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan				
<b>PROGRAM UNGGULAN GUBERNUR JOSPOL :</b> Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri & layanan publik				
<b>TUJUAN 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses</b> <b>SASARAN 1 : Akselerasi Perekonomian Daerah</b>				
<b>TUJUAN 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b> <b>SASARAN 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme</b>				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	Peningkatan efektifitas penerapan regulasi terkait pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan	Percepatan pengukuhan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	
			Penguatan Komitmen Stakeholders untuk memanfaatkan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan	
			Peningkatan desiminasi dan pemahaman tentang manfaat hasil riset dan inovasi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan, secara intensif	
		Peningkatan upaya Hilirisasi Hasil Riset dan inovasi sebagai produk/layanan yang bermanfaat bagi masyarakat	Pengembangan skema kolaborasi pendanaan Hilirisasi Hasil Riset dan inovasi bersumber dari APBN, swasta dan Luar Negeri	
			Pengembangan komersialisasi Hilirisasi Hasil Riset dan inovasi melalui kerjasama dengan dunia usaha	
			Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi melalui penguatan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha	
	Peningkatan Kemampuan produksi Riset dan inovasi berkualitas untuk memenuhi kebutuhan peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah, secara berkelanjutan	Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Peningkatan efektifitas Tata kelola pelayanan administrasi penyelenggaraan riset dan inovasi	Peningkatan Kapasitas (kuantitas dan kualitas) Peneliti, Perekayasa dan inovator di daerah
				Peningkatan penyelenggaraan riset dan inovasi antar wilayah dan antar sektor yang sinergi dan terpadu
				Peningkatan pendanaan riset dan inovasi melalui kolaborasi pendanaan di luar APBD
				Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan
			Pembangunan pusat pengolahan data dan informasi (Big Data) sesuai kebutuhan riset dan inovasi berbasis teknologi informasi	
			Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan penunjang penyelenggaraan riset dan inovasi	

Strategi dan arah kebijakan dilaksanakan melalui pentahapan sebagai landasan dalam penyusunan Tematik Rencana Kerja (Renja) tahunan.

**Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Balitbangda/BRIDA Kaltim**

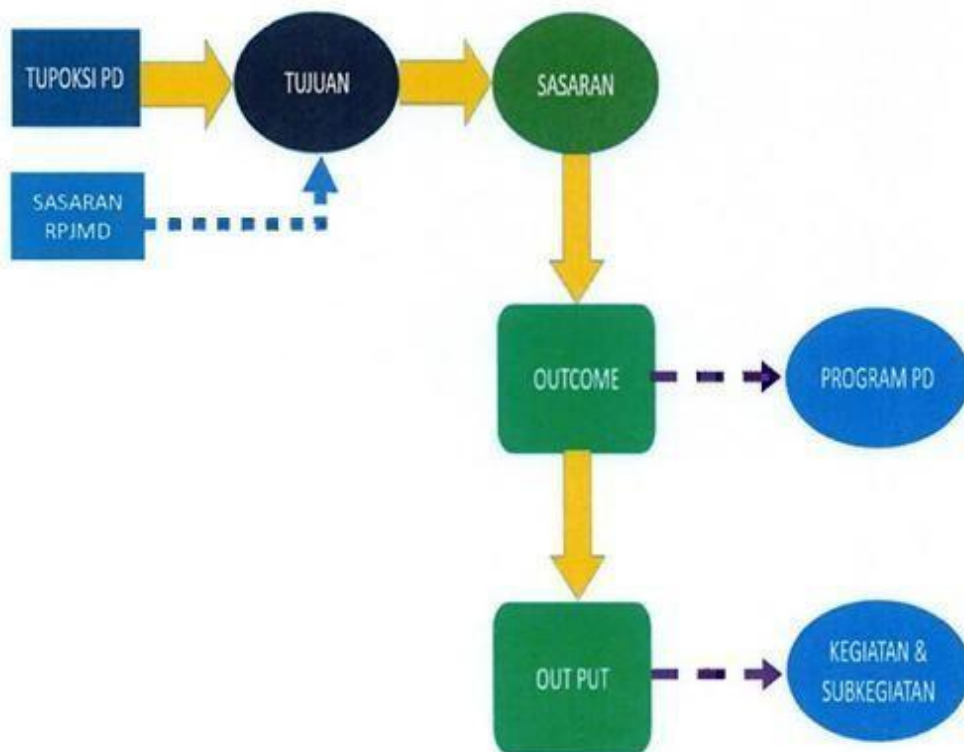
TAHAP I 2025	TAHAP I 2026	TAHAP I 2027	TAHAP I 2028	TAHAP I 2029
Tahap konsolidasi yang meletakkan titik berat pada peningkatan jumlah dan kualitas riset multi/inter/trans disiplin, riset spesifik dan riset klaster, kolaborasi, serta publikasi ilmiah di tingkat nasional maupun internasional.	Penguatan kerjasama multipihak dan Penerapan Hasil Riset dan Inovasi berbasis teknologi	Peningkatan jumlah publikasi internasional berkualitas, Penguatan inovasi bisnis dan sosial	Inovasi dan Hilirisasi Riset kerjasama kolaboratif dengan mitra industri strategis nasional dan internasional	Agent of economic and Social development (inovasi, pengetahuan dan teknologi baru)

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dasaran organisasi, Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pendanaan sampai dengan lima tahun kedepan, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 4.1, meliputi ;

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan 4 ( empat) kegiatan ;
  - a. Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan,
  - b. Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan,
  - c. Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan,
  - d. Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi.
2. Program Riset dan Inovasi, dengan 2 (dua) kegiatan ;
  - a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
  - b. Invensi dan Inovasi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 8 (delapan) kegiatan ;
  - a. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah,
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra  
Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim



Tabel 4.1 Cascading Kinerja Renstra Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim

NO.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR
	TUJUAN : Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan	$= \frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK yang Dimanfaatkan dalam Pembangunan}}{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi}} \times 100\%$	IMPACT
		Indeks Inovasi Daerah	Penilaian Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI yang terdiri dari 2 (dua) aspek, 8 (delapan) variabel dan 36 (tiga puluh enam) indikator	IMPACT
	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	$= \frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Permasalahan Pembangunan dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah}}{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi}} \times 100\%$	IMPACT
		Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	$= \frac{\text{Jumlah Inovasi yang Memenuhi Kriteria Matang}}{\text{Jumlah Inovasi Perangkat Daerah}} \times 100\%$	IMPACT
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras dengan isu strategis/ permasalahan dan potensi unggulan daerah	$= \frac{\text{Jumlah hasil riset dan inovasi yang selaras dengan isu strategis/permasalahan pembangunan dan potensi unggulan daerah}}{\text{Jumlah seluruh hasil riset dan inovasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	OUTCOME
		Persentase hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional/buku/naskah akademis rancangan perda/pergub	$= \frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang Dipublikasikan}}{\text{Jumlah Seluruh Hasil Riset yang Dihasilkan}} \times 100\%$	OUTCOME
		Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI)	$= \frac{\text{Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang Ditindaklanjuti dalam Daftar Kekayaan Intelektual (KI)}}{\text{Jumlah Seluruh Hasil Riset yang Dihasilkan}} \times 100\%$	OUTCOME

NO.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR
	<b>Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan,</b>	<b>Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dari hasil fasilitasi dan riset bidang pemerintahan dan peraturan/regulasi</b>	$= \frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan}}{\text{Jumlah riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan}} \times 100\%$	<b>OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)</b>
	Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		OUTPUT
	Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum		OUTPUT
	Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		OUTPUT
	Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		OUTPUT
	Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Badan Usaha Milik Desa		OUTPUT
	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Laporan Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan		OUTPUT
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Jumlah dokumen hasil Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan		OUTPUT

NO.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR
	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan potensi pengembangan unggulan daerah dari hasil riset bidang sosial dan kependudukan	$= \frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan riset bidang sosial dan kependudukan yang memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan}}{\text{Jumlah riset bidang sosial dan kependudukan}} \times 100\%$	OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)
	Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang aspek-aspek sosial		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan pendidikan dan kebudayaan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan pendidikan dan kebudayaan		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan kesehatan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan kesehatan		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan tenaga kerja		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan partisipasi masyarakat	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan partisipasi masyarakat		OUTPUT
	Kegiatan Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah dari hasil riset bidang ekonomi dan Pembangunan	$= \frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan riset bidang ekonomi dan Pembangunan yang memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan}}{\text{Jumlah riset bidang bidang ekonomi dan Pembangunan}} \times 100\%$	OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan		OUTPUT

NO.	TUJUAN, SA SARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan kelautan dan perikanan		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan energi dan sumberdaya mineral	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan energi dan sumberdaya mineral		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan kehutanan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan kehutanan		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan pekerjaan umum	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan pekerjaan umum		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan perhubungan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan perhubungan		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan penataan ruang dan pertanahan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan penataan ruang dan pertanahan		OUTPUT
	Penelitian dan Pengembangan komunikasi dan informatika	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan komunikasi dan informatika		OUTPUT

NO.	TUJUAN, SA SARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR
	<b>Kegiatan Pengembangan inovasi dan teknologi</b>	<b>Persentase inovasi berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten</b>	$= \frac{\text{Jumlah inovasi berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan Hak Paten}}{\text{Jumlah inovasi yang difasilitasi.}} \times 100\%$	<b>OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)</b>
	Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi		OUTPUT
	Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah Laporan hasil Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		OUTPUT
	Desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Desiminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif		OUTPUT
	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		OUTPUT
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		OUTPUT
	<b>Program Riset dan Inovasi</b>	<b>Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan (Policy Brief)</b>	$= \frac{\text{Jumlah Naskah Kebijakan (Policy Brief)}}{\text{Jumlah Hasil Riset}} \times 100\%$	OUTCOME
		<b>Persentase pengembangan hasil invensi dan inovasi</b>	$= \frac{\text{Jumlah Invensi dan Inovasi yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Inovasi Perangkat Daerah}} \times 100\%$	OUTCOME
	<b>Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan</b>	<b>Persentase sinergi program kegiatan antar sektor dan antar wilayah sesuai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK</b>	$= \frac{\text{Jumlah Program kegiatan RIPJPIT yang sinergi antar sektor dan antar wilayah}}{\text{Jumlah Program kegiatan RIPJPIT}} \times 100\%$	<b>OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)</b>
	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan		OUTPUT
	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset		OUTPUT

NO.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR									
	Invensi dan Inovasi	Persentase realisasi kerjasama/ kolaborasi/kemitraan riset, invensi dan inovasi	= $\frac{\text{Jumlah Realisasi Kerjasama}}{\text{Jumlah Rencana Kerjasama}} \times 100\%$	OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)									
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		OUTPUT									
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi		OUTPUT									
	SASARAN 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	= $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi Saat Survey}} \times \text{Nilai Penimbang}$	IMPACT									
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi AKIP yang terdiri dari: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan capaian kinerja	IMPACT									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	= $\frac{\text{Jumlah pengaduan atau laporan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan atau laporan yang masuk}}$	OUTCOME									
		Indeks Kualitas layanan Kesekretariatan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen Perhitungan</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Persentase realisasi anggaran</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen Perhitungan	Bobot	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	40%	Persentase realisasi anggaran	30%	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	25%	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	5%
Komponen Perhitungan	Bobot												
Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	40%												
Persentase realisasi anggaran	30%												
Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	25%												
Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	5%												
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	= $\frac{\text{Jumlah realisasi kinerja yang mencapai target}}{\text{Jumlah kinerja yang direncanakan}} \times 100\%$	OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		OUTPUT									
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi		OUTPUT									
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi		OUTPUT									
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi		OUTPUT									
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi		OUTPUT									

NO.	TUJUAN, SA SARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi		OUTPUT
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		OUTPUT
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Menurunnya pergeseran anggaran belanja</b>	$= \frac{\text{Jumlah rekening belanja yang mengalami pergeseran}}{\text{Jumlah total rekening belanja yang direncanakan}} \times 100\%$	<b>OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		OUTPUT
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		OUTPUT
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		OUTPUT
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		OUTPUT
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		OUTPUT
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		OUTPUT
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian keberadaan Barang Milik Daerah terhadap catatan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	$= \frac{\text{Jumlah unit BMD yang jelas keberadaannya}}{\text{Jumlah total unit BMD yang tercatat}} \times 100\%$	<b>OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		OUTPUT

NO.	TUJUAN, SA SARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		OUTPUT
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		OUTPUT
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		OUTPUT
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		OUTPUT
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi Pegawai</b>	$= \frac{\text{Jumlah pegawai yang memerlukan kelengkapan administrasi}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	<b>OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan		OUTPUT
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		OUTPUT
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		OUTPUT
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		OUTPUT
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan bahan pelayanan umum kantor</b>	$= \frac{\text{Jumlah bahan pelayanan umum yang disediakan}}{\text{Jumlah kebutuhan bahan pelayanan umum}} \times 100\%$	<b>OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		OUTPUT
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		OUTPUT
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		OUTPUT
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		OUTPUT

NO.	TUJUAN, SA SARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		OUTPUT
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		OUTPUT
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		OUTPUT
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		OUTPUT
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		OUTPUT
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas Balitbangda/Brida</b>	$= \frac{\text{Jumlah unit BMD yang disediakan}}{\text{Jumlah Kebutuhan BMD yang direncanakan}} \times 100\%$	<b>OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan		OUTPUT
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan		OUTPUT
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel yang disediakan		OUTPUT
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		OUTPUT
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		OUTPUT
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		OUTPUT
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		OUTPUT

NO.	TUJUAN, SA SARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Penunjang tugas Kesbangpol</b>	$= \frac{\text{Jumlah jasa pelayanan penunjang yang disediakan}}{\text{Jumlah jasa pelayanan penunjang yang direncanakan}} \times 100\%$	<b>OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		OUTPUT
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik		OUTPUT
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		OUTPUT
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		OUTPUT
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik</b>	$= \frac{\text{Jumlah unit BMD yang dipelihara/diperbaiki}}{\text{Jumlah BMD yang perlu dipelihara, kurang berfungsi/rusak}} \times 100\%$	<b>OUTCOME ANTARA (INTERMEDIATE)</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya		OUTPUT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya		OUTPUT
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara		OUTPUT
	Pemeliharaan Aset tak berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara		OUTPUT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		OUTPUT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		OUTPUT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		OUTPUT

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
<b>TUJUAN 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b> <b>SASARAN 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme</b>	<b>Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi</b>	-	-	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan	Pemanfaatan Hasil Riset Secara Optimal	-	-		
				Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	-	-		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Meningkatnya kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi	-	-		
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Balitbangda/BRIDA	-	-		
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	-	Meningkatnya Kualitas layanan Kesekretariatan dan keluhan pengguna layanan	-	
					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-		-	
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian Program kegiatan yang konsisten dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	-	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			Dokumen	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)			Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)			Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			Laporan	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			Laporan	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Menurunnya pergeseran anggaran belanja</b>		<b>Menurunnya Pergeseran Anggaran Belanja</b>	-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)			Daftar Orang	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			Dokumen	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			Dokumen	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			Dokumen	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			Laporan	
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian keberadaan Barang Milik Daerah terhadap catatan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>		<b>Kesesuaian Keberadaan BMD terhadap Catatan Dokumen Admnistrasi BMD</b>	-	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			Dokumen	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			Dokumen	
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			Laporan	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			Laporan	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			Laporan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi Pegawai</b>		<b>Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Pegawai</b>	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			Pakaian Dinas	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)			Dokumen	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			Sertifikat Diklat Pegawai	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			Sertifikat Bimtek Pegawai	
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentasi pemenuhan kebutuhan bahan pelayanan umum kantor</b>		<b>Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Bahan Pelayanan Umum Kantor</b>	-	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			Barang Cetak dan Penggandaan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			Laporan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			Laporan	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			Dokumen	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			Dokumen	
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas B a l i t a n g d a / BRIDA</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Riset Dan Inovasi</b>	-	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)			Mebelair	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)			Peralatan dan Mesin	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			Gedung Kantor	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Penunjang tugas BRIDA</b>		<b>Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Riset Dan Inovasi</b>	-	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			Laporan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			Laporan	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			Laporan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)			Laporan	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik</b>		<b>Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik</b>	-	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)			Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)			Peralatan dan Mesin	
			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)			Aset Tak Berwujud	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			Gedung Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	
<b>TUJUAN 1 :</b> Terwujudnya Kaltim Sukses <b>SASARAN 1 :</b> Akselerasi Perekonomian Daerah		<b>Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan</b>		<b>Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah</b>	<b>Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah</b>	-	-	
				<b>Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah</b>	-	-	
				<b>Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI) (%)</b>	-	<b>Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang terdaftar dalam Kekayaan Intelektual (KI)</b>	-	
			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional/buku/naskah akademis rancangan perda/pergub (%)</b>	-	<b>Meningkatnya publikasi hasil riset dan inovasi</b>	-	
		<b>Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategs/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah (%)</b>		-	<b>Meningkatnya Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategs/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah</b>	-		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dari hasil fasilitasi dan riset bidang pemerintahan dan peraturan/regulasi		Meningkatnya rekomendasi penyelesaian Permasalahan Pembangunan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan	-	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)			Laporan	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)			Laporan	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)			Laporan	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)			Laporan	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)			Laporan	
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)			Laporan	
			Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan (Rekomendasi)			Rekomendasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan potensi pengembangan unggulan daerah dari hasil riset bidang sosial dan kependudukan</b>		<b>Meningkatnya rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah di bidang sosial dan kependudukan</b>	-	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen )			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan partisipasi masyarakat	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan partisipasi masyarakat			Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah dari hasil riset bidang ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>Meningkatnya rekomendasi penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah di bidang ekonomi dan Pembangunan</b>		
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)			Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)			Dokumen	
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)			Dokumen	
			<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase inovasi berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten</b>		<b>Meningkatnya inovasi berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten</b>		
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)			Dokumen	
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)			Laporan	
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)			Laporan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM /KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	IMPACT	OUTCOME	OUTPUT	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)			Laporan	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)			Laporan	
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan (Policy Brief) (%)		Hilirisasi hasil riset dan inovasi	-	
				Persentase pengembangan hasil invensi dan inovasi (%)				-
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase sinergi program kegiatan antar sektor dan antar wilayah sesuai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK		Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK yang sinergi antara nasional, provinsi dan kabupaten/kota	-	
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)			Laporan	
			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)			Naskah	
			Invensi dan Inovasi	Persentase realisasi kerjasama/ kolaborasi/kemitraan riset, invensi dan inovasi		Meningkatnya kerjasama/ kolaborasi/kemitraan riset, invensi dan inovasi	-	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)			Laporan	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)			Laporan	

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				27.825.197.409		24.364.052.000		22.833.791.000		24.098.944.000		25.168.082.000		26.833.914.000	
<b>5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	20.358.840.406	100	19.085.497.408	100	20.364.527.610	100	21.382.754.271	100	22.451.892.271	100	23.574.486.326	
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	76		76		78		78,5		79		79,5		
<b>5.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian Program kegiatan yang konsisten dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	N/A	80,00	401.583.312	85,00	301.483.312	90,00	967.296.918	95,00	409.354.014	97,50	931.279.994	98,50	410.000.000	
5.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	324.100.000	10	224.000.000	10	332.410.702	10	331.870.702	10	331.870.230	10	350.000.000	
5.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.799.828	1	4.799.828	1	Rp4.799.828	1	4.799.828	1	4.799.828	1	10.000.000	
5.05.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.799.828	1	4.799.828	1	Rp47.998.280	1	4.799.828	1	47.998.280	1	10.000.000	
5.05.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.941.828	1	3.941.828	1	Rp3.941.828	1	3.941.828	1	3.941.828	1	10.000.000	
5.05.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.941.828	1	3.941.828	1	Rp39.418.280	1	3.941.828	1	3.941.828	1	10.000.000	
5.05.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	21	21	53.192.000	21	53.192.000	21	Rp531.920.000	21	53.192.000	21	531.920.000	21	10.000.000	
5.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	6.808.000	5	6.808.000	5	Rp6.808.000	5	6.808.000	5	6.808.000	5	10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>5.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Menurunnya pergeseran anggaran belanja</b>	N/A	4,70	13.071.312.122	3,80	13.162.064.024	2,90	13.071.312.122	2,00	13.071.312.122	1,10	13.071.312.122	0,20	13.101.118.698	
5.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	45	69	12.819.078.698	68	12.909.830.600	70	12.819.078.698	80	12.819.078.698	80	12.819.078.698	80	12.819.078.698	
5.05.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	242.040.000	12	242.040.000	12	242.040.000	12	242.040.000	12	242.040.000	12	242.040.000	
5.05.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	723.000	1	723.000	1	723.000	1	723.000	1	723.000	1	10.000.000	
5.05.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	579.500	1	579.500	1	579.500	1	579.500	1	579.500	1	10.000.000	
5.05.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	3.894.000	1	3.894.000	1	3.894.000	1	3.894.000	1	3.894.000	1	10.000.000	
5.05.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	30	30	4.996.924	30	4.996.924	30	4.996.924	30	4.996.924	30	4.996.924	30	10.000.000	
<b>5.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian keberadaan Barang Milik Daerah terhadap catatan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	N/A	84,64	8.710.000	85,08	9.246.100	85,64	9.246.100	86,19	9.246.100	86,74	9.246.100	87,29	40.536.100	
5.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1	10.000.000	
5.05.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1	10.000.000	
5.05.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	1	536.100	1	536.100	1	536.100	1	536.100	1	536.100	
5.05.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	910.000	12	910.000	12	910.000	12	910.000	12	910.000	12	10.000.000	
5.05.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	2.600.000	12	2.600.000	12	2.600.000	12	2.600.000	12	2.600.000	12	10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>5.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi Pegawai</b>	N/A	75.53	113.180.000	76,47	61.180.000	80.88	149.180.000	83,82	649.180.000	88,23	649.180.000	91,56	750.000.000	
5.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	0	0	0	0,00	0	0,00	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	
5.05.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	11.180.000	1	11.180.000	1	11.180.000	1	11.180.000	1	11.180.000	1	50.000.000	
5.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25	15	90.000.000	30	40.000.000	30	90.000.000	30	90.000.000	30	90.000.000	35	100.000.000	
5.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	12.000.000	30	10.000.000	30	48.000.000	30	48.000.000	30	48.000.000	30	100.000.000	
<b>5.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan bahan pelayanan umum kantor</b>	N/A	76	2.065.213.151	80	1.445.061.655	90	2.028.517.153	94	2.528.517.153	96	2.960.255.153	98	3.817.293.172	
5.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	41.528.741	1	41.528.741	1	41.528.741	1	41.528.741	1	41.528.741	1	50.000.000	
5.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	767.100.088	1	246.000.000	1	646.128.495	1	646.128.495	1	646.128.495	1	700.000.000	
5.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	63.122.881	1	58.024.876	1	58.024.876	1	58.024.876	1	58.024.876	1	58.024.876	
5.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	81.080.750	1	81.080.750	1	81.080.750	1	81.080.750	1	81.080.750	1	81.080.750	
5.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	29.333.500	1	118.707.100	1	118.707.100	0	118.707.100	1	118.707.100	1	118.707.100	
5.05.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
5.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	934.647.191	12	801.320.188	12	934.647.191	12	1.434.647.191	12	1.866.385.191	12	2.639.480.446	
5.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	31.400.000	1	31.400.000	1	31.400.000	1	31.400.000	1	31.400.000	1	50.000.000	
5.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	1	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	20.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>5.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas Balitbangda/BRIDA</b>	N/A	3,04	54.749.714	3,99	54.749.714	5,59	54.749.714	6,39	64.743.840	7,19	702.143.840	8,65	702.143.840	
5.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000	1	10.000.000	
5.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	600.000.000	1	600.000.000	
5.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	52.143.840	1	52.143.840	1	52.143.840	1	52.143.840	1	52.143.840	1	52.143.840	
5.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	10	5.874	10	5.874	10	5.874	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	
5.05.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1	2.600.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
5.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000	1	10.000.000	
5.05.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000	1	10.000.000	
<b>5.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pelayanan Penunjang tugas BRIDA</b>	N/A	85,78	3.867.085.109	85,98	3.275.241.705	86,18	3.865.427.609	86,38	3.873.930.616	86,58	3.873.930.616	86,88	3.873.930.616	
5.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	23.233.007	12	23.233.007	12	23.233.007	
5.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	561.629.205	12	560.241.705	12	560.241.705	12	560.241.705	12	560.241.705	12	560.241.705	
5.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	390.412.800	12	200.000.000	12	390.412.800	12	390.412.800	12	390.412.800	12	390.412.800	
5.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	35	2.900.043.104	35	2.500.000.000	35	2.899.773.104	35	2.900.043.104	35	2.900.043.104	35	2.900.043.104	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>5.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik</b>	N/A	10,51	777.006.998	11,26	776.470.898	12,01	218.797.994	12,76	776.470.426	13,51	254.544.446	13,72	879.463.900	
5.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	5	152.087.998	6	152.087.998	6	152.087.998	6	152.087.998	6	152.087.998	6	160.000.000	
5.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	9	198.655.000	6	198.655.000	0	0,00	6	198.655.000	0	0,00	6	198.655.000	
5.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	80	49.302.000	80	49.302.000	80	49.302.000	80	49.302.000	90	49.302.000	90	49.302.000	
5.05.01.1.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	44.400.000	1	44.400.000	0	0,00	1	44.400.000	1	44.400.000	1	50.000.000	
5.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	4	233.772.000	4	233.772.000	0	0,00	4	233.772.000	0	0,00	6	300.000.000	
5.05.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.150.000	1	10.150.000	1	10.150.000	1	10.150.000	0	0,00	1	20.000.000	
5.05.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	88.640.000	2	88.103.900	2	7.257.996	2	88.103.428	2	8.754.448	2	101.506.900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategs/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah (%)	70	72,73		75,76		78,79		81,82		84,85		87,88		
	Persentase hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan dalam jurnal nasional/ internasional/buku/naskah akademis rancangan perda/pergub (%)	70	72,73	7.466.357.003	75,76	5.078.554.592	78,79	1.469.263.390	81,82	1.516.189.729	84,85	1.516.189.729	87,88	1.759.427.674	
	Persentase hasil riset dan inovasi yang ditindaklanjuti dalam daftar Kekayaan Intelektual (KI) (%)	N/A	72,73		75,76		78,79		81,82		84,85		87,88		
5.05.02.1.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dari hasil fasilitasi dan riset bidang pemerintahan dan peraturan/regulasi	N/A	57,14	1.253.212.894	64,29	968.554.592	68,57	359.263.390	71,43	406.189.729	78,57	406.189.729	83,87	459.427.674	
5.05.02.1.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	1	1	293.091.020	1	149.291.202	1	40.000.000	1	86.925.867	1	86.925.867	1	86.925.867	
5.05.02.1.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	1	2	393.286.520	2	140.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	80.000.000	
5.05.02.1.01.0004 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	1	129.077.020	1	147.263.390	1	47.263.390	1	47.263.390	1	47.263.390	1	47.263.390	
5.05.02.1.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	2	1	148.307.020	1	122.000.000	1	122.000.000	1	122.000.472	1	122.000.472	1	135.238.417	
5.05.02.1.01.0011 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	1	1	173.209.020	1	130.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
5.05.02.1.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	1	1	63.153.274	1	140.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
5.05.02.1.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan (Rekomendasi)	4	2	53.089.020	5	140.000.000		40.000.000	5	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>5.05.02.1.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan potensi pengembangan unggulan daerah dari hasil riset bidang sosial dan kependudukan</b>	N/A	50,00	1.103.393.770	58,33	1.170.000.000	63,33	170.000.000	66,67	170.000.000	75,00	170.000.000	78,00	210.000.000	
5.05.02.1.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1	1	237.372.120	1	230.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
5.05.02.1.02.0002 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	1	1	186.218.000	1	240.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	80.000.000	
5.05.02.1.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	2	1	171.642.000	2	240.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
5.05.02.1.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1	1	162.068.000	1	240.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
5.05.02.1.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen )	1	1	185.787.650	1	220.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
5.05.02.1.02.0010 Penelitian dan Pengembangan partisipasi masyarakat	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan partisipasi masyarakat	0	1	160.306.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
<b>5.05.02.1.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan Pembangunan dan pengembangan potensi unggulan daerah dari hasil riset bidang ekonomi dan Pembangunan</b>	N/A	53,08	2.915.068.670	60,00	1.450.000.000	66,92	450.000.000	72,31	450.000.000	80,00	450.000.000	85,00	520.000.000	
5.05.02.1.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1	1	196.306.590	1	150.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.05.02.1.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1	1	171.178.134	1	130.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	
5.05.02.1.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0	1	135.400.412	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5.05.02.1.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1	1	212.615.877	1	140.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	
5.05.02.1.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	1	273.000.020	1	140.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.02.1.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	1	1	153.351.619	1	140.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	
5.05.02.1.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	1	736.328.302	1	150.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
5.05.02.1.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	1	1	144.151.506	1	130.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	
5.05.02.1.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	1	1	211.391.805	1	140.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
5.05.02.1.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	1	1	209.087.835	1	140.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
5.05.02.1.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	1	1	197.611.820	1	130.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
5.05.02.1.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	1	1	191.571.920	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
5.05.02.1.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	1	1	83.072.830	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
<b>5.05.02.1.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase inovasi berbasis IPTEK yang terdaftar dalam HKI dan hak paten</b>	<b>N/A</b>	<b>53,00</b>	<b>2.194.681.669</b>	<b>60,00</b>	<b>1.490.000.000</b>	<b>67,00</b>	<b>490.000.000</b>	<b>72,00</b>	<b>490.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>490.000.000</b>	<b>82,00</b>	<b>570.000.000</b>	
5.05.02.1.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	2	7	813.569.328	3	300.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	180.000.000	
5.05.02.1.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	2	1	190.966.044	2	300.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
5.05.02.1.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	3	3	897.995.959	3	300.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
5.05.02.1.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	3	3	197.678.020	3	290.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	
5.05.02.1.04.0005 - Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	1	94.472.318	1	300.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase pengembangan hasil invensi dan inovasi (%)	N/A	0	0,00	45,71	200.000.000	51,43	1.000.000.000	57,14	1.200.000.000	62,86	1.200.000.000	68,57	1.500.000.000	
	Persentase hasil riset yang ditindaklanjuti dalam naskah kebijakan (Policy Brief) (%)	N/A	0	0,00	52,94	200.000.000	64,71	1.000.000.000	76,47	1.200.000.000	88,24	1.200.000.000	94,12	1.500.000.000	
5.05.03.1.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase sinergi program kegiatan antar sektor dan antar wilayah sesuai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK	N/A	0	0,00	41,18	200.000.000	52,94	650.000.000	64,71	750.000.000	76,47	850.000.000	86,97	950.000.000	
5.05.03.1.01.0001 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0	0,00	4	200.000.000	6	650.000.000	8	750.000.000	10	850.000.000	12	950.000.000	
5.05.03.1.01.0003 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5.05.03.1.02 - Invensi dan Inovasi	Persentase realisasi kerjasama/kolaborasi/kemitraan riset, invensi dan inovasi	N/A	0	0,00	35,29	0,00	47,06	350.000.000	58,82	450.000.000	70,59	350.000.000	75,82	550.000.000	
5.05.03.1.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	0	0,00	1	0,00	1	175.000.000	1	225.000.000	1	175.000.000	1	275.000.000	
5.05.03.1.02.0013 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi (Laporan)	0	0	0,00	1	0,00	1	175.000.000	1	225.000.000	1	175.000.000	1	275.000.000	

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Hilirisasi Hasil Riset dan Inovasi	Kegiatan : Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			Sub Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Sub Kegiatan : Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			Kegiatan : Inovasi dan Inovasi	
			Sub Kegiatan : Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inovasi dan inovasi	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Kaltim 2025-2030

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>I TUJUAN : Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi</b>									
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Berbasis IPTEK dalam Pembangunan	%	69,70	72,73	75,76	81,82	87,88	93,94	
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	62,87	64,00	65,13	66,26	67,39	68,52	Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030.
<b>II SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Hasil Riset dan Inovasi untuk peningkatan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah secara berkelanjutan</b>									
1	Persentase hasil riset dan inovasi yang selaras untuk penyelesaian masalah pembangunan dan peningkatan potensi unggulan daerah	%	60,61	66,67	72,73	78,79	84,85	90,91	
2	Persentase tingkat kematangan inovasi Perangkat Daerah	%	44,44	51,85	55,56	59,26	62,96	66,67	
<b>III SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan pendukung penyelenggaraan Riset dan Inovasi</b>									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	86,32	86,89	87,11	87,78	88,41	89,76	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,25	75,87	76,65	77,13	77,89	78,32	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Balitbangda Provinsi Kaltim 2025-2030

INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang Selaras dengan Isu Strategis/Permasalahan dan Potensi Unggulan Daerah	%	70	72,73	75,76	78,79	81,82	84,85	87,88	
Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam Naskah Kebijakan	%	N/A	41,18	52,94	64,71	76,47	88,24	94,12	
Persentase Pengembangan Hasil Inovasi dan Inovasi	%	N/A	40	45,71	51,43	57,14	62,86	68,57	

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, Indikator-indikator tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Balitbangda/BRIDA Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009